



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 491.05/Kep.251-Diskominfo/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR : 491.05/Kep-96-Diskominfo/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Maka Perlu merubah Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 491.05/Kep.96-Diskominfo/2023 tentang Pembentukan Tim Asistensi Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Sistem Elektronik Instansi Penyelenggaraan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 150 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Aplikasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 150);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 491.05/Kep.96-Diskominfo/2023 tentang Pembentukan Tim Asistensi Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 23 Mei 2023

 BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 491.05/Kep.251-Diskominfo/2023  
TANGGAL : 23 Mei 2023  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :  
491.05/Kep-96-Diskominfo/2023 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM ASISTENSI PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN  
APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM ASISTENSI PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.
- III. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika.  
2. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.  
3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.  
4. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

 BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA